

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Essa Salman Taufiqurrohman*, Engkus
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*Email: essasalman1188@gmail.com**

Riwayat Artikel

Diterima: 1 Juni 2026
Disetujui: 16 Juni 2026
Diterbitkan: 30 Juni 2026

Abstract

Indonesia is a country with a high level of disaster vulnerability due to its geographical and geological conditions, as well as the effects of climate change, which increase the frequency and intensity of disasters, particularly hydrometeorological disasters. These conditions have prompted a paradigm shift in disaster management from an emergency response-oriented approach toward a Disaster Risk Reduction (DRR) approach that emphasizes mitigation, prevention, and community capacity building. This study aims to analyze the role of community participation in supporting the implementation of Disaster Risk Reduction (DRR) policies, identify forms of community participation, and determine strategies to strengthen participation in achieving effective and sustainable disaster governance. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through literature review (library research). Data were obtained from scientific journal articles, books, policy documents, regulations, and relevant publications by national and international institutions, and were then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques based on the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that community participation plays a strategic role in supporting the implementation of DRR policies through engagement in the planning, implementation, monitoring, and evaluation stages of disaster management programs.

Keywords: *Collaborative Governance, Community Participation, Disaster Risk Reduction, Policy Implementation, Public Administration.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki Tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan pengaruh perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang berorientasi pada tanggap darurat menuju pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang menekankan aspek mitigasi, pencegahan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi Masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), mengidentifikasi bentuk bentuk partisipasi masyarakat,

serta memutuskan strategi penguatan partizipasi dalam mewujudkan tata Kelola kebencanaan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, regulasi, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan PRB melalui keterlibatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kebencanaan. Keterlibatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan, penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, pengurangan tingkat kerentanan, serta pembangunan ketahanan komunitas terhadap bencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, implementasi kebijakan, pengurangan risiko bencana, administrasi publik, *collaborative governance*.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara tiga lempeng paling aktif di dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Satu per satu dari ketiga lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan berbeda beda satu sama lain, pertemuan lempeng tersebut memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia berhubung Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Tidak hanya satu bencana, tetapi dampak dari lempeng tersebut menyebabkan Indonesia dikelilingi oleh berbagai jenis bencana (Agung Harijoko, Diana Puspitasari, Irfani Prabaningrum, Kirana Putri Prastika, 2021). Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), arti dari bencana Adalah suatu peristiwa atau situasi yang mengancam serta mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat mengancam kehidupan Masyarakat Dimana saja dan kapan saja yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam salah satunya yaitu oleh manusia yang dapat mengakibatkan munculnya kerusakan pada lingkungan, kerugian harta atau benda, dampak pada sisi psikologis hingga korban jiwa. Dengan berbagai peristiwa bencana di Indonesia, suatu rencana dan Tindakan yang terstruktur diperlukan untuk menanggulangi ancaman dari suatu peristiwa bencana, Upaya tersebut dapat disebut sebagai mitigasi bencana yaitu suatu Tindakan penanggulangan bencana (Umeidini et al., 2019). Menurut Paripurano dalam Umeidini et al. (2019) penanggulangan bencana merupakan suatu Tindakan untuk mengurangi Risiko bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam atau perilaku manusia yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai pelaku utama yang didukung oleh pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari 2.000 kejadian bencana di Indonesia dan sekitar 98% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan lebih dari 1.000 kejadian, diikuti cuaca ekstrem,

kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta kekeringan. Dominasi bencana hidrometeorologi tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana di Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari faktor geologi, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim yang ekstrem (Mufarida, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pengurangan risiko bencana menjadi semakin penting untuk dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Tingginya frekuensi bencana, besarnya kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta meningkatnya ancaman perubahan iklim menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya berfokus pada respons darurat setelah bencana terjadi. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai aktor utama, untuk mendukung implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana guna mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa mendatang (BNBP, 2024).

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma penanggulangan bencana mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya penanganan bencana lebih berfokus pada respons darurat dan rehabilitasi pascabencana, saat ini pendekatan tersebut bergeser menuju upaya mitigasi, pencegahan, dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Pergeseran paradigma ini didorong oleh meningkatnya frekuensi dan dampak bencana yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar. Pendekatan responsif dinilai kurang efektif karena hanya menangani dampak setelah bencana terjadi, sedangkan pendekatan preventif melalui Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mampu meminimalkan potensi kerugian dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kerangka ini juga sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan pengurangan risiko sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan (Kelman & Glantz, 2015).

Di Indonesia, pelaksanaan PRB memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup kegiatan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Undang-undang tersebut menempatkan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Implementasi kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman nasional dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana melalui penguatan tata kelola risiko, peningkatan kapasitas daerah, serta pembangunan yang berorientasi pada resiliensi bencana (BNBP, 2016).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana telah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko bencana di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani dan Hery Wibowo (2019) mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menemukan bahwa masyarakat berperan aktif dalam berbagai bentuk partisipasi, meliputi partisipasi pemikiran, tenaga, keterampilan, barang, dan dukungan finansial. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, pembuatan tanggul darurat, pemantauan

debit air secara berkala, penyebaran informasi peringatan dini, serta kerja sama dalam proses evakuasi dan pemulihan pascabencana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan tokoh masyarakat (local leader) memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan penanggulangan bencana. Melalui partisipasi yang terbangun secara kolektif, masyarakat menjadi lebih siap menghadapi banjir musiman dan mampu melakukan tindakan mitigasi secara mandiri.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana telah dilakukan oleh Adji Aidil dkk. (2025) yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana, seperti sosialisasi kebencanaan, kerja bakti lingkungan, pelatihan kesiapsiagaan, serta kegiatan penanggulangan saat bencana terjadi. Penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya mitigasi bencana di tingkat lokal. Namun, keterlibatan masyarakat masih cenderung terfokus pada tahap pelaksanaan kegiatan dan respons terhadap bencana, sementara keterlibatan dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan masih relatif rendah. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat, antara lain kurangnya edukasi kebencanaan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah membuktikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kebencanaan dan belum menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PRB dalam perspektif administrasi publik. Dengan kata lain, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, proses koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pencapaian tujuan kebijakan pengurangan risiko bencana.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam perspektif administrasi publik. Jika penelitian terdahulu hanya mengkaji bentuk partisipasi masyarakat atau tingkat keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan PRB. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat masyarakat sebagai objek penerima manfaat kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam proses implementasi kebijakan. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas karena menghubungkan konsep partisipasi masyarakat dengan teori implementasi kebijakan publik, tata kelola kebencanaan, dan collaborative governance yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Menurut George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bukan sekadar menjalankan program, tetapi merupakan proses yang melibatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Pembangunan dan tata Kelola publik, termasuk dalam Upaya pengurangan Risiko bencana. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong individu untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan Bersama serta bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. John M. Cohen dan Norman T. Uphoff mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan Masyarakat dalam berbagai tahapan Pembangunan, mulai dari pengembalian Keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi kegiatan. Konsep ini menempatkan Masyarakat bukan hanya sebagai objek oembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kebijakan (Cohen, J.M, Uphoff, 1977).

Dalam konteks pengurangan Risiko bencana, partisipasi Masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan komunitas. Penelitian mengenai mitigasi longsor di Tana Toraja menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi pada aspek pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, namun masih rendah pada aspek perencanaan dan evaluasi program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sering kali hanya dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, sementara keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Temuan serupa juga ditemukan pada berbagai program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan mampu meningkatkan efektivitas program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara signifikan (Stevani Sitilan, 2026)

Tingkat partisipasi Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi Tingkat Pendidikan, pengetahuan kebencanaan, kesadaran Masyarakat terhadap Risiko bencana, pengalaman menghadapi bencana, dan motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas kepemimpinan lokal, dukungan pemerintah, akses terhadap informasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan. Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan program Kampung Siaga Bencana. Selain itu, akses informasi dan pendidikan kebencanaan yang

memadai juga berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Ruslanjari et al., 2024).

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, partisipasi masyarakat mampu meningkatkan legitimasi kebijakan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keterlibatan tersebut juga berdampak pada meningkatnya efektivitas program karena kebijakan yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan faktor strategis dalam mendukung implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Melalui keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, kebijakan yang dijalankan akan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola kebencanaan yang kolaboratif dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Implementasi PRB dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan adaptasi. Pencegahan merupakan upaya untuk menghindari munculnya risiko bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila bencana terjadi, baik melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Kesiapsiagaan bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana melalui pelatihan, simulasi, dan penyusunan rencana kontinjensi.

Sistem peringatan dini (*early warning system*) berfungsi memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan penyelamatan secara tepat waktu. Adapun adaptasi menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Laporan BNPB tahun (2024) menunjukkan bahwa sekitar 98% kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, sehingga penguatan aspek adaptasi dan mitigasi menjadi prioritas dalam kebijakan PRB nasional (BNBP, 2024)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui studi literatur (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami, menganalisis, dan menggambarkan secara mendalam peran partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebencanaan. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat serta kontribusinya dalam

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perspektif administrasi publik.

Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam berdasarkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Pendekatan deskriptif berfokus pada upaya menjelaskan kondisi, karakteristik, dan hubungan antarkomponen suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, kontribusinya terhadap implementasi kebijakan PRB, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas partisipasi tersebut. Pendekatan deskriptif juga dinilai relevan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam tata kelola kebencanaan

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction), yaitu menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kedua, penyajian data (data display) dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) untuk mengidentifikasi pola, temuan, serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan PRB. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif (Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi faktor-faktor penyebab Risiko bencana melalui pengurangan Tingkat kerentanan serta peningkatan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Konsep PRB berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan penanggulangan bencana yang sebelumnya lebih berorientasi pada Tindakan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Dalam perkembangannya, paradigma penanggulangan bencana mengalami pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif yang menekankan aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan ketangguhan masyarakat. Tujuan utama PRB adalah meminimalkan potensi korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta gangguan terhadap pembangunan melalui pengelolaan risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan (Kelman & Glantz, 2015).

Perkembangan kebijakan PRB ditandai dengan perubahan paradigma dari penanganan darurat menuju pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan. Landasan utama kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup kegiatan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Undang-undang ini juga menempatkan mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dalam

upaya mengurangi risiko bencana serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana (BNBP, 2024).

Pelaksanaan kebijakan PRB di Indonesia juga mengacu pada rencana nasional penanggulangan bencana (Renas PB) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dokumen tersebut menjadi pedoman strategis dalam menintegrasikan pengurangan Risiko bencana ke dalam perencanaan Pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Indonesia turut mengadopsi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai kerangka global pengurangan Risiko bencana. Kerangka Sendai menekankan empat prioritas utama, yaitu memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana, meningkatkan investasi untuk ketahanan bencana, serta memperkuat kesiapsiagaan dan pembangunan kembali yang lebih baik setelah bencana (Kelman & Glantz, 2015).

Dalam implementasinya, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan PRB. Pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi, menyediakan sumber daya, membangun sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan integrasi aspek kebencanaan dalam kebijakan Pembangunan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PRB tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh Tingkat partisipasi Masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan Risiko dan dampak bencana sehingga memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, serta sumber daya sosial yang dapat mendukung efektivitas Upaya pengurangan Risiko bencana.

Pendekatan berbasis masyarakat (community-based disaster risk reduction) menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan dalam kebijakan PRB. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan kebencanaan. Keterlibatan masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, memperkuat kapasitas lokal, serta membangun ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kebijakan, tetapi menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola kebencanaan yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan sumber ancaman maupun dampak bencana. Dalam perspektif partisipatif, keterlibatan masyarakat tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pengelolaan risiko bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya membangun ketangguhan terhadap bencana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan kapasitas lokal, memperkuat kesiapsiagaan, dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (Lassa et al., 2018).

Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa terkait kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, pemetaan risiko bencana, serta pembentukan dan pengembangan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan lokal yang dimiliki sehingga kebijakan maupun program yang disusun lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan karakteristik ancaman bencana setempat. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan juga mendorong munculnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program kebencanaan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui berbagai kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, seperti gotong royong membersihkan saluran drainase untuk mengurangi risiko banjir, penanaman vegetasi di daerah rawan longsor, pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB), pelaksanaan simulasi evakuasi, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program mitigasi tidak hanya membantu mengurangi risiko bencana secara langsung, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang. Berbagai studi menunjukkan bahwa program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana (Andhika, 2018).

Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam aspek pengawasan. Bentuk partisipasi ini dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi lingkungan, pengawasan wilayah rawan bencana, pelaporan kerusakan infrastruktur, serta penyampaian informasi terkait potensi ancaman bencana kepada pemerintah atau lembaga terkait. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana umumnya memiliki pengetahuan lokal yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat memperkuat sistem peringatan dini serta mempercepat respons terhadap potensi ancaman yang muncul (Vidiadari et al., 2023).

Secara keseluruhan, partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi menunjukkan bahwa Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengurangan Risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. Semakin tinggi Tingkat partisipasi Masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan PRB karena program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memperoleh dukungan Masyarakat, dan mampu meningkatkan ketahanan komunitas terhadap berbagai ancaman bencana.

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Kebijakan PRB

Partisipasi masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PRB melalui keterlibatan dalam penyusunan rencana kontinjensi, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), simulasi evakuasi, dan berbagai kegiatan mitigasi berbasis komunitas. partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Sejalan dengan konsep tersebut, keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana mampu meningkatkan efektivitas program kebencanaan, memperkuat koordinasi antarwarga, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan edukasi kebencanaan, pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi, dan pembentukan kelompok siaga bencana. Pendekatan *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun kapasitas lokal sehingga mampu mengidentifikasi risiko, melakukan mitigasi, serta memberikan respons awal terhadap ancaman bencana. Masyarakat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan kebencanaan memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum memperoleh program tersebut.

Partisipasi masyarakat juga mampu mengurangi tingkat kerentanan melalui berbagai kegiatan mitigasi berbasis komunitas, seperti konservasi lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah, dan pembangunan sistem peringatan dini. Kegiatan tersebut tidak hanya mengurangi potensi risiko bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pendekatan mitigasi berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi kebijakan PRB juga ditentukan oleh tata kelola kebencanaan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil. *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah publik secara bersama-sama. Dalam konteks kebencanaan, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum kebencanaan, musyawarah desa, penyusunan rencana kontinjensi, serta evaluasi program secara partisipatif. Hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana (Kelman & Glantz, 2015).

Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Keberhasilan implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, strategi penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan literasi kebencanaan, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana mitigasi dan komunikasi risiko bencana (Khafian, 2023).

Strategi pertama adalah peningkatan edukasi dan literasi kebencanaan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Integrasi materi kebencanaan dalam kurikulum sekolah, pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala, pelatihan tanggap darurat, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai potensi bahaya, tetapi juga membentuk budaya sadar bencana (*disaster awareness culture*) sehingga masyarakat mampu mengambil tindakan yang tepat sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun komunitas yang tangguh terhadap berbagai jenis bencana.

Selanjutnya penguatan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), maupun Kelompok Siaga Bencana (KSB). Keberadaan kelembagaan berbasis masyarakat menjadi wadah koordinasi, pembelajaran, serta pengorganisasian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Kelembagaan yang kuat juga mampu memperkuat kepemimpinan lokal, memperjelas pembagian peran, serta meningkatkan keberlanjutan program PRB di tingkat desa maupun kelurahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan kebencanaan memiliki kapasitas adaptasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang belum memiliki organisasi serupa.

Berikutnya yaitu penguatan kolaborasi multipihak melalui pendekatan *collaborative governance*. Penanggulangan bencana merupakan persoalan publik yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan PRB. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan rencana kontinjensi secara partisipatif, pelaksanaan pelatihan bersama, penguatan forum koordinasi, serta berbagi sumber daya dan informasi (Dwirahmadi et al., 2023).

Kemudian pemanfaatan teknologi digital, sebagai pendukung implementasi kebijakan PRB. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sistem peringatan dini (*early warning system*), aplikasi kebencanaan, sistem informasi geografis (SIG), media sosial, serta platform komunikasi digital. Teknologi tersebut memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi risiko bencana, serta mempermudah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sebelum maupun saat terjadi bencana (Akbar et al., 2025). Selain itu, media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi, penyebaran informasi mitigasi, pelaporan kondisi darurat, hingga penghimpunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan. Pemanfaatan teknologi digital yang dikombinasikan dengan partisipasi aktif masyarakat terbukti mampu memperkuat sistem pengurangan risiko bencana yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan strategi penguatan partisipasi masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, perluasan jejaring kolaborasi, serta optimalisasi teknologi digital. Integrasi keempat strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), memperkuat ketangguhan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola kebencanaan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

E. SIMPULAN

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan pendekatan strategis dalam penanggulangan bencana yang berorientasi pada upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Di Indonesia, implementasi kebijakan PRB telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), serta mengacu pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan PRB, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kontinjensi, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pelaksanaan mitigasi berbasis komunitas, pengawasan lingkungan, serta evaluasi program kebencanaan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana, serta membangun ketahanan komunitas. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1980), teori implementasi kebijakan Edward III (1980), serta konsep *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan kebijakan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan edukasi dan literasi kebencanaan, penguatan kelembagaan berbasis masyarakat seperti Desa Tangguh Bencana dan Kelompok Siaga Bencana, pengembangan kolaborasi multipihak antara pemerintah, BPBD, akademisi, dunia usaha, dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi, sistem peringatan dini, dan komunikasi risiko bencana. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola kebencanaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agung Harijoko, Diana Puspitasari, Irfani Prabaningrum, Kirana Putri Prastika, N. W. (2021). *No Title*. Gadjah Mada University Press.
- Aidil, A., Wahab, A., Syariq, M. A., Hidayat, R. F., & Setiawan, E. (2025). *BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SUMEDANG : 10(2)*, 48–53.
- Akbar, M. F., Hidayat, W., Yuliani, H., Lestari, D. A., & Allifiansyah, S. (2025). Peran Komunikasi Partisipatif Dalam Penguatan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 214–227. <https://doi.org/10.37090/jmp.v5i1.2253>
- Andhika, A. N. (2018). Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas : Penguatan Komunikasi Interpersonal dalam Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana 313 Desa Langensari kecamatan Lembang. *Pekerjaan Sosial*, 17(2), 244–257. <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i2.142>
- BNBP. (2016). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2025*. 4(1), 1–23.
- BNBP. (2024). *Data Bencana Indonesia 2024*.
- Cohen, J.M.; Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Popline. <https://popline.org/node/499235>
- Dwirahmadi, F., Barnes, P., Wibowo, A., Amri, A., & Chu, C. (2023). Linking Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation through Collaborative Governance:

- Experience from Urban Flooding in Jakarta. *Geosciences (Switzerland)*, 13(11).
<https://doi.org/10.3390/geosciences13110353>
- Horn, D. S. V. M. C. E. Van. (11975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Ohio State University*, 445–488.
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Indonesia, P. (2007). *Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
- John W. Creswell, J. D. C. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/research-design-5-255675>
- Kelman, I., & Glantz, M. H. (2015). Analyzing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Science*, 6(2), 105–106.
<https://doi.org/10.1007/s13753-015-0056-3>
- Khafian, N. (2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(2), 158–175.
<https://doi.org/10.20473/jgar.v4i2.53367>
- Lassa, J. A., Boli, Y., Nakmofa, Y., Fanggidae, S., Ofong, A., & Leonis, H. (2018). Twenty years of community-based disaster risk reduction experience from a dryland village in Indonesia. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 10(1), 1–10.
<https://doi.org/10.4102/jamba.v10i1.502>
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. Sage Publications.
- Mufarida, B. (2024). *No Title*. Okezone News.
<https://news.okezone.com/read/2024/12/31/337/3100327/bnpb-2-093-bencana-melanda-indonesia-selama-tahun-2024>
- Ruslanjari, D., Putri, R. A. P., Puspitasari, D., & Sulistiyo, S. (2024). Embracing leadership of local actors and community in disaster risk reduction of Yogyakarta. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1679>
- Stevani Sitilan, H. (2026). *Community Participation In Landslide Disaster Mitigation : Examining Implementation And Benefit Distribution In Makale Subdistrict , Tana Toraja Regency , Indonesia Participação Da Comunidade Na Mitigação De Desastres Causados Por Deslizamentos De Terra :*
- Umeidini, F., Nuriah, E., & Fedryansyah, M. (2019). Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. *Pekerjaan Sosial*, 2(2), 13–22.
- Vidiadari, I. S., Praharsiwi, C. S., & Birowo, M. A. (2023). Keterlibatan masyarakat pada radio komunitas untuk pengurangan risiko bencana. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–12. <https://doi.org/10.24002/senapas.v1i1.7273>